

KONFLIK PEREBUTAN KEKUASAAN ANTARA KAUM NASIONALIS DAN KOMUNIS DI REPUBLIK TIONGKOK TAHUN 1912-1949

Deni Adi Wijaya, Sumardi, Sumarjono.
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: sumardimhum@ymail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah Republik Tiongkok merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Periode tahun 1917-1920, Republik Tiongkok dimasuki ajaran Marxis-Leninisme dari Uni Soviet karena terinspirasi keberhasilan Kaum Bolshevik Republik Tiongkok merupakan Faktor pendorong timbulnya konflik antara kaum nasionalis dan kaum komunis bisa ditinjau dari dua faktor antara lain; (1) Faktor Ekstern, pasca reorganisasi Kuomintang yang dilakukan Sun Yat Sen, antara tahun 1921-1924 terjadi perubahan sistem birokrasi yang meniru Uni Soviet. Dampak perubahan tersebut karena pengiriman teknisi Uni Soviet di bidang pertahanan dan keamanan serta bidang birokrasi negara, dan (2) Faktor Intern, pasca wafatnya Sun Yat Sen tahun 1925, kondisi pemerintahan tidak stabil. Posisi Presiden digantikan oleh Chiang Kai Shek yang membuat kebijakan memperkuat posisi kaum nasionalis di Partai Nasionalis (Kuomintang). Kebijakan Chiang Kai Shek mengakibatkan penghapusan keanggotaan kaum komunis di Partai Nasionalis (Kuomintang). Proses konflik ideologi yang mengarah kepada konflik penguasaan pemerintah Tiongkok antara kaum nasionalis dan kaum komunis berlangsung dalam dua tahap konflik yaitu; konflik tahap pertama (periode tahun 1927-1945); dan konflik tahap kedua (periode tahun 1945-1949). Kondisi demikian membuat penelitian ini menarik dikaji karena terjadi penerapan teori domino komunis di kawasan Asia Timur. Dampak dari konflik antara kaum nasionalis dan komunis menyebabkan terbentuknya negara Republik Rakyat Tiongkok tanggal 1 Oktober 1949 dan Republik Taiwan Tahun 1949. Selain itu, akibat kemenangan kaum komunis menimbulkan terbentuknya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Hanoi-Pyongyang pada tahun 1959 sebagai implementasi penerapan kebijakan luar negeri Mao Tse Tung tentang internasionalisasi komunis.

Kata Kunci: Konflik, Perebutan Kekuasaan, Kaum Nasionalis dan Komunis, Tiongkok

ABSTRACT

The background of this study is the Republic of China is a country located in East Asia. Year period 1917-1920, the Republic of China entered the Marxist-Leninist doctrine of the Soviet Union because the Bolsheviks inspired by the success of the Republic of China is the driving factors for the emergence of a conflict between the nationalists and the communists can be viewed from two factors, among others; (1) External Factors, after the reorganization of the Kuomintang carried out Sun Yat Sen, between 1921-1924 changes bureaucratic system that mimics the Soviet Union. The impact of changes due dispatch technicians Soviet Union in the field of defense and security as well as areas of the state bureaucracy, and (2) of the Internal Factor, after the death of Sun Yat-sen in 1925, the condition of unstable governments. The position of president was replaced by Chiang Kai Shek who make policy to strengthen the position of the nationalists in the Nationalist Party (Kuomintang). Chiang Kai-shek's policy resulted in the elimination of the membership of the communists in the Nationalist Party (Kuomintang). The process of ideological conflicts that lead to the control of the Chinese government's conflict between the nationalists and the communists took place in two stages, namely conflict; The first phase of the conflict (the period 1927-1945); and the conflict of the second phase (period 1945-1949). Such conditions make it an interesting study examined due to the application of the domino theory of communism in East Asia. The impact of the conflict between the nationalists and communists led to the formation of the People's Republic of China on 1 October 1949, the Republic of Taiwan Year 1949. In addition, due to the victory of the communist cause the formation of the axis Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Beijing-Pyongyang in 1959 as an implementation of the application foreign policy of Mao Tse Tung on internationalization communists

Keywords: Conflict, Coup d'etat, The Nationalist and Communist, Tiongkok.

A. PENDAHULUAN

Pertengahan abad 19 wilayah Asia Timur terdiri dari Tiongkok, Korea, dan Jepang masih menerapkan politik isolatif (*sakoku*). Negara-negara barat seperti Inggris, Rusia, Jerman, dan Perancis bersaing memperebutkan penghasil bahan baku dan pasaran untuk industri. Kondisi awal Tiongkok masih menerapkan sistem kekaisaran yang diperintah oleh dinasti asing yaitu Dinasti Manchu. Kekuasaan Manchu berkuasa di Tiongkok selama 300 tahun dan berakibat munculnya gerakan anti dinasti Manchu. Dampak dari munculnya gerakan anti asing di Tiongkok mengakibatkan runtuhnya dinasti Manchu pada tanggal 12 Februari 1912.

Gagasan untuk mengakhiri Manchu menimbulkan sebuah revolusi di Tiongkok yang didasari keinginan untuk menghapuskan sistem kerajaan dan menerapkan sistem republik di Tiongkok. Titik puncaknya pada tanggal 1 Januari 1912 didirikan Republik Tiongkok (Ping, 1991: 30). Jabatan Presiden pertama dipegang oleh Sun Yat Sen, sementara posisi Kerajaan Manchu telah jatuh, Kaisar Hsuan T'ung turun tahta pada tahun 1912 dan memberikan tugas kepada Yuan Shih K'ai untuk membentuk republik. Akhirnya Sun Yat Sen memberikan mandat posisi Presiden kepada Yuan Shih K'ai untuk menghindari adanya perselisihan dan mewujudkan persatuan di Republik Tiongkok.

Pasca Republik Tiongkok berdiri pertentangan mengenai cita-cita politik dan perebutan kekuasaan seringkali terjadi serta menimbulkan perubahan disertai timbulnya konflik antar golongan. Konflik tersebut mengakibatkan terbentuknya faksi-faksi didasari rasa tidak puas terhadap pemerintahan Yuan Shih K'ai yang berusaha mengembalikan Republik Tiongkok ke sistem kekaisaran (Mittler, 2011: 42-43).

Pasca Yuan Shih K'ai wafat pada tahun 1916, situasi politik di Republik Tiongkok menjadi tidak stabil akibat terlalu seringnya pergantian Presiden karena dominasi dari pemimpin militeristik semakin kuat. Para *warlords*

menguasai beberapa Propinsi (Tjeng, 1983: 348). Akibat situasi politik di Republik Tiongkok, Sun Yat Sen dipilih kembali sebagai Presiden oleh kaum nasionalis pada tanggal 21 Januari 1921 yang berkedudukan di Canton (Waung, 1971: 53).

Transisi kekuasaan di Republik Tiongkok menimbulkan masuknya paham komunis dari Uni Soviet. Faktor tersebut karena kebijakan Sun Yat Sen mengenai reorganisasi terhadap Partai Kuomintang. Akibat kemenangan Partai Komunis yang berhasil menggulingkan Kaisar Tsar II dalam Revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917. Partai Komunis Rusia, berencana untuk mendirikan Biro Timur Jauh di Siberia yaitu sebuah cabang dari Komunis Internasional dan biro tersebut bertanggung jawab kepada Komintern untuk mengatur pendirian Partai Komunis Tiongkok (The Epoch Times, 2005: 20).

Sun Yat Sen menjalin hubungan dengan Uni Soviet, untuk meniru pelaksanaan birokrasi yang diterapkan di Partai Kuomintang (Clegg, 1947: 47). Pengaruh komunis semakin bertambah subur karena Sun Yat Sen mendatangkan teknisi bernama Michael Borodin ke pemerintahan di Tiongkok. Pasca meninggalnya Sun Yat Sen pada tahun 1925, kekuasaan dipegang oleh Chiang Kai Shek. Pemerintahan nasionalis semakin radikal dan semakin menguatkan kaum nasionalis di kekuasaan. Kaum komunis keluar dari aliansi bersama dengan kaum nasionalis. Kaum komunis mendirikan partai baru (Kungchintang) dan langsung membuat kebijakan menggerakkan kaum petani di Provinsi Hunan tahun 1927 (Wittfogel, 1955: 6).

Terjadinya konflik antara kaum nasionalis dan komunis mempunyai tujuan yang menarik yaitu untuk menyatukan Republik Tiongkok menjadi suatu negara republik nasionalis merupakan tujuan dari kaum nasionalis. Kaum komunis yang berhaluan Marxis-Leninisme juga bertujuan untuk menyebarluaskan paham komunisme di Asia (Wint, 1958: 1).

Konflik antara kaum nasionalis dan kaum komunis bertujuan untuk merebutkan kekuasaan di Republik

Tiongkok. Konflik tersebut terjadi karena intervensi asing yaitu Uni Soviet yang menginginkan perluasan paham komunisme di Republik Tiongkok serta melakukan kudeta kekuasaan dari pemerintah nasionalis. Kaum komunis melakukan Long March dari Tiongkok Selatan ke Tiongkok Utara (Shensi Utara) untuk meminta bantuan Uni Soviet akibat terdesak pasukan nasionalis (Wint, 1958: 30).

Pasca berakhirnya Perang Dunia II, konflik antara kaum nasionalis dan komunis berlanjut lagi setelah bersatu saat menghadapi intervensi Jepang. Intervensi asing di Tiongkok semakin nyata karena mempunyai kepentingan. Amerika Serikat mengirimkan diplomat bernama John Marshall untuk melakukan mediasi antara kaum nasionalis dan komunis serta mengupayakan Republik Tiongkok agar tidak jatuh ke komunis (Wint, 1958: 44). Uni Soviet juga berusaha membantu pihak komunis pimpinan Mao Tse Tung untuk memenangkan pengaruh di Tiongkok.

Akhirnya konflik antara kaum nasionalis dan komunis berakhir pada tahun 1949. Konflik ini diakhiri dengan kekalahan kaum nasionalis dan Chiang Kai Shek beserta pasukannya melarikan diri ke Taiwan (*Formosa*), sedangkan Mao Tse Tung mendeklarasikan pembentukan *Republik Rakyat Tiongkok* pada 1 Oktober 1949 (Mittler, 2011: 73). Konflik antara nasionalis dan komunis mengakibatkan Republik Tiongkok berpaham komunis.

Permasalahan yang dibahas adalah.

1. Bagaimana kondisi politik Republik Nasionalis Tiongkok Tahun 1912-1919 dan munculnya paham komunisme tahun 1920-1927?
2. Bagaimana proses konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok tahun 1927-1949?
3. Bagaimana dampak konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok tahun 1949?

Tujuan penelitian ini adalah.

1. Menganalisis kondisi politik Republik Nasionalis Tiongkok Tahun 1912-1919 dan munculnya paham komunisme tahun 1920-1927.
2. Menganalisis proses konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok tahun 1927-1949.
3. Menganalisis dampak konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok tahun 1949.

Manfaat penelitian ini adalah.

1. Bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang materi kesejarahan dalam pendidikan yaitu Sejarah Tiongkok Kontemporer tentang tumbuhnya pergerakan nasional Republik Tiongkok sampai terbentuknya *Republik Rakyat Tiongkok* dan *Republik Taiwan*.
2. Bagi dunia pendidikan, memberikan sumbangan materi pembelajaran Kelas XI dalam pengayaan KD 3.4; tentang menganalisis keterkaitan antara revolusi-revolusi besar dunia (Perancis, Amerika, Cina, Rusia, dan Indonesia) dan kehidupan umat manusia pada masa itu dan masa kini.
3. Bagi Almamater, sebagai pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yaitu penelitian sehingga dapat dijadikan studi literatur dan bacaan untuk memperkaya pengetahuan khususnya bagi sivitas akademika Universitas Jember.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penulisan sejarah yang berusaha mengkaji dan menganalisis sumber-sumber sejarah secara kritis, sehingga bertujuan untuk menghasilkan penulisan sejarah yang dapat dipercaya dan terbebas dari unsur keberpihakan sumber. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau

(Gottschalk, 1985: 39). Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penulisan sejarah meliputi; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama dalam melakukan penulisan sejarah adalah heuristik. Heuristik merupakan proses awal penulis lakukan untuk mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Penulis dalam kegiatan ini mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan “*Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis dan Komunis di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949*”.

Langkah kedua dalam penulisan sejarah adalah melakukan kritik. Kritik adalah upaya yang dilakukan sejarawan untuk mendapatkan keaslian sumber, apakah sumber itu asli atau palsu. Langkah penulis selanjutnya yaitu tahap menguji dengan menyeleksi sumber yang dilakukan dengan dua macam yaitu, kritik intern dan kritik ekstern. *Kritik intern* digunakan untuk menilai dan menguji isi sumber dari dalam apakah sumber tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Cara yang ditempuh yaitu dengan menilai isi buku dan membandingkan dengan sumber lain apakah relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bisa dipercaya kebenarannya, agar memperoleh data-data yang teruji kebenarannya.

Langkah berikutnya adalah Interpretasi merupakan suatu langkah untuk melakukan penafsiran. Langkah ini menuntut kehati-hatian penulis untuk menghindari subjektivitas terhadap fakta satu dengan fakta lain yang terhubung. Pada tahap interpretasi fakta-fakta yang diperoleh diseleksi kemudian penulis menentukan fakta mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan ini. Peneliti melakukan penafsiran terhadap pelaksanaan *Agrarische Wet* di Jember pada tahun 1870-1928 dengan cara membandingkan dan menghubungkan makna dari fakta-fakta sejarah yang telah teruji.

Langkah terakhir adalah proses historiografi merupakan langkah - langkah penulis selanjutnya yaitu menuangkan segala interpretasinya dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri

dari tujuh bab yaitu (1) bab 1 adalah Pendahuluan, (2) bab 2 berisikan tinjauan pustaka, (3) bab 3 menyajikan metode penulisan, (4) Bab 4, memaparkan kondisi politik Republik Tiongkok dan munculnya komunisme tahun 1912-1927, (5) Bab 5, memaparkan proses konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok Tahun 1927-1949, (6) Bab 6, memaparkan dampak konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok tahun 1949, dan (7) bab 7 yaitu penutup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Politik Republik Nasionalis Tiongkok Tahun 1912-1919 dan Munculnya Paham Komunisme Tahun 1920-1927

1. Latar Belakang Terbentuknya Republik Nasionalis Tiongkok di Canton Tahun 1912

Berdirinya Republik Nasionalis Tiongkok akibat penerapan pemerintahan Manchu yang korup. Pemerintah Manchu mengalami kekalahan bidang diplomatik dan militer dengan negara Barat. Latar belakang internal adalah kekecewaan rakyat Tiongkok terhadap pemerintahan Kaisar Hsuan T'ung, banyak mengalami kemunduran. Bentuk kekecewaan diwujudkan dengan melakukan pemberontakan di Propinsi-Propinsi bagian dari dinasti Manchu. Di sisi lain, rakyat Tiongkok kecewa terhadap bentuk pemerintahan Hal itu karena Kaisar Hsuan T'ung tidak bisa mengendalikan pemerintahan dan menyebabkan kekalahan segala bidang dengan negara Barat (Inggris, Perancis, Rusia dan Jerman). Pada pemerintahan Kaisar Hsuan T'ung dinilai tidak cakap dalam memerintah, sehingga timbul berbagai pemberontakan dan gerakan rakyat di Wuchang dan Canton.

Faktor eksternal Terbentuknya Republik Nasionalis Tiongkok adalah peranan Miyazaki Toten adalah seorang penulis surat kabar Asahi dari Jepang. Miyazaki Toten berperan sebagai tokoh yang memuat cita-cita Sun Yat Sen tentang demokrasi dan menyebarkan ke radio-radio dan surat kabar di Jepang. Akibat bantuan Miyazaki

Toten, Sun Yat Sen mendirikan perkumpulan bernama *Zhongguo Dongmenghui*, anggotanya harus berikrar untuk (Leung, 2006: 41); (1) Mengusir bangsa Manchu, (2) Merebut kembali China bagi Bangsa Tionghoa, dan (3) Mendirikan suatu negara berbentuk Republik dan pembagian tanah secara adil.

Langkah-langkah yang diambil Sun Yat Sen ialah membentuk suatu organisasi bernama *Zhongguo Dongmenghui*. Wujudnya dengan bekerjasama dengan Miyazaki Toten, Sun Yat Sen bertindak sebagai pengeluar ide atau gagasan sementara Miyazaki Toten sebagai orang Jepang yang mendukung cita-cita Sun Yat Sen. Paparan di atas, merupakan faktor-faktor pendirian Republik Nasionalis Tiongkok. Dapat disimpulkan, pemerintah Manchu tidak dapat mengatasi krisis dalam negeri, Tiongkok sering mengalami kekalahan terhadap bangsa Barat menimbulkan turunnya pemerintahan Manchu. Akibatnya pemerintahan semakin mundur dan muncullah Sun Yat Sen untuk membentuk pemerintahan nasionalis Tiongkok di Canton.

2. Masuknya Paham Komunisme di Republik Tiongkok Tahun 1920-1927

Daerah Asia Timur merupakan suatu kawasan yang terdapat dua pengaruh ideologi besar dunia yaitu ideologi komunisme yang dibawa oleh Uni Soviet dan negara barat (Perancis dan Inggris). Secara khusus negara barat tersebut membawa pengaruh paham demokrasi. Dampak dari masuknya negara barat di Republik Tiongkok khususnya Perancis yaitu semakin kuatnya pengaruh nasionalisme. Nasionalisme yang dibawa negara barat berasal dari Revolusi Perancis yang dipelopori oleh rakyat dan kaum intelektual. Di wilayah Tiongkok juga terpengaruh oleh Revolusi Perancis yang melahirkan sebuah konstitusi sistem republik berdasarkan *San Min Chu I*.

Paham komunis berasal dari Rusia setelah kemenangan kaum komunis Bolshevik. Pada bulan Oktober tahun 1917 merupakan awal dari perubahan bentuk pemerintahan ke komunis, hal itu berdampak di Republik Tiongkok. Dampak bidang politik, Uni Soviet

berusaha menghimpun para pelajar Tiongkok yang belajar di Moskow untuk melakukan perebutan kekuasaan. Dapat dipahami kedekatan geografis menimbulkan mudah dan cepatnya eksodus komunis ke Tiongkok. Pada tahun 1919 merupakan awal penyebaran komunis dengan mengiriskan Voitchinsky berusaha mengorganisir kekuatan revolusioner seperti Li Dazhao dan Chen Duxiu (Leung, 2006: 68). Alasan pokok yaitu jumlah penduduk Republik Tiongkok terbesar di dunia, menimbulkan Uni Soviet berusaha mendirikan negara komunis.

Pemulaan Revolusi Oktober tahun 1917 di Rusia menimbulkan dampak secara langsung di Tiongkok. Dampak tersebut dengan masuknya paham komunisme dari Uni Soviet. Di sisi lain, di Tiongkok terjadi krisis kepemimpinan akibat tidak adanya tokoh yang bisa mempersatukan Tiongkok karena birokrasi saling berebut pengaruh masing-masing. Pada tahun 1921, Uni Soviet bersama pemerintah Sun Yat Sen menyetujui berdirinya perkumpulan kaum komunis.

Pada fase awal pendirian Partai Kungchantang tahun 1921, terdapat peranan tokoh intelektual bernama Li Li Shan. Li Li Shan merupakan alumnus dari Universitas Buruh Timur (The University for Toilers of the East) di Moskow (Wint, 1958: 48). Di universitas ini, intelektual-intelektual Tiongkok dididik dan didoktrin dengan pembelajaran yang dirancang langsung oleh Komintern melalui sekolah akademi. Akademi yang didirikan seperti akademi Profesor Merah (Red Professor Accademy). Akademi ini didirikan oleh tokoh revolusioner merah dari India bernama M.N Roy, akademi ini diperuntukkan bagi pelajar Uni Soviet. Dari lulusan sekolah dan akademi tersebut melahirkan tokoh-tokoh intelektual kiri Tiongkok seperti Li Li Shan, Li Dazhao, Chen Duxiu, Wang Ching Wei, Lin Biao dan lain-lain. Dari nama tersebut, penulis mencoba menganalisis aktor intelektual bernama Li Li Shan karena sebagai pendiri Partai Kungchantang tahun 1921.

Peranan Li Li Shan terlihat menonjol di Tiongkok karena telah mendirikan partai komunis pertama di dunia

tahun 1921. Peranan tersebut oleh penulis dapat ditinjau dari dua faktor antara lain.

(1) Faktor Eksternal, Li Li Shan merupakan lulusan dari Universitas Buruh Timur di Moskow. Pemikiran Li Li Shan terpengaruh oleh kegagalan penerapan demokrasi bergaya Barat di Tiongkok. Hasilnya sangat mengecewakan karena terjadi insiden 14 Mei 1919 membuat pemerintah Tiongkok kalah di segala bidang oleh negara Barat (Inggris dan Perancis). Pemikiran Li Li Shan bahwa penerapan teori Marxis-Leninisme yang dipelajari di Uni Soviet dapat dijadikan obat dalam menyelesaikan permasalahan di Tiongkok. Selain itu, Li Li Shan bersama Maring dan Nikolsky berunding untuk mempersiapkan proposal pendirian Partai Kungchintang sebagai kelanjutan cabang Komintern di Vladivostok.

(2) Faktor Intern, Li Li Shan berusaha melobi pemerintahan Sun Yat Sen untuk membagi kuota kursi di birokrasi dengan kaum nasionalis. Pembagian tersebut disetujui Sun Yat Sen untuk menciptakan situasi persatuan. Para anggota komunis diberikan posisi penting di Partai Kuomintang sebagai partai tunggal di tahun 1921-1925.

B. Proses Konflik Antara Kaum Nasionalis dan Komunis Di Republik Tiongkok Tahun 1927-1949

1. Latar Belakang Konflik Tahap Pertama Tahun 1927-1945

Konflik antara kaum komunis dan kaum nasionalis pada periode pertama tahun 1927-1945 merupakan titik awal keluarnya kaum komunis di dalam Partai Kuomintang. Inti perjuangan kaum komunis yaitu tentang "*Revolusi Proletarian*" di pemerintahan Chiang Kai Shek. Program komunis berusaha mendirikan negara tandingan yaitu pembentukan Republik Komunis Tiongkok di Wuhan.

1.1 Faktor Eksternal

Latar belakang eksternal antara kaum nasionalis dan kaum komunis adalah intervensi Uni Soviet. Hal itu berawal dari reorganisasi Kuomintang yang dilakukan

Sun Yat Sen yang dibantu penasihat pemerintahan nasionalis dari Uni Soviet bernama Adolfe Joffe. Pihak pemerintahan nasionalis mengirimkan misi ke Uni Soviet untuk belajar mengenai birokrasi pemerintahan. Di sisi lain, Uni Soviet telah mendirikan Biro Timur Jauh di Siberia di kota Vladivostok. Biro tersebut di bawah kendali Komintern, lalu mengirimkan agen bernama Michael Borodin. Diplomasi Sun Yat Sen di dunia internasional untuk mencari dukungan mengenai reunifikasi dengan komunis ditolak oleh Amerika Serikat dan Inggris (Ebrey et al, 2009: 415). Borodin menyarankan kaum komunis untuk bersatu di bawah kendali kaum nasionalis dan akan melakukan janji kepada kaum komunis untuk membantu perjuangan dalam merebut kekuasaan.

Kaum komunis dan kaum nasionalis bersatu di dalam Partai Kuomintang yang menjadi partai tunggal. Persatuan kedua golongan tersebut mendapat arahan dari Borodin. Kepentingan kaum komunis dibatasi oleh pemerintahan nasionalis, maka pada bulan Nopember 1926, Borodin mengorganisasi pemberontakan untuk merebut kekuasaan (Bain, 1962: 138). Faktor ini yang mengakibatkan Chiang Kai Shek menggerakkan tentaranya untuk melakukan pembasmian terhadap kaum komunis.

Faktor yang menyebabkan konflik berkepanjangan di dalam Partai Kuomintang adalah desakan dari Uni Soviet. Desakan tersebut berupa nasihat untuk melakukan penyerangan ke Tiongkok bagian Utara, dalam usaha untuk mempersatukan Tiongkok di bawah kendali kaum nasionalis. Uni Soviet memberikan bantuan berupa pelatihan politik, bantuan militer, dan keuangan (Mittler, 2011: 50). Langkah-langkah yang diterapkan Uni Soviet dalam melakukan bantuan ke kaum komunis antara lain;

- (1) Pemberian bantuan politik dengan cara mempersatukan kelompok Tiongkok bagian Selatan dengan Tiongkok bagian Utara. Strategi persatuan Republik Tiongkok yang dijalankan komunis dengan cara mengirimkan penasihat ketatanegaraan dari Uni Soviet,
- (2) Bantuan militer yang diberikan Uni Soviet dengan

mendirikan Akademi Militer Whampoa pada Mei 1924. Akibat intervensi Uni Soviet pada tahun 1926, Kuomintang keluar dari barisan Canton, melakukan Ekspedisi Utara untuk menaklukkan Tiongkok Utara dan lembah Sungai Yang Tze (Wint, 1958: 14). Tahun 1927 kaum nasionalis mengeluarkan kebijakan yaitu memutuskan hubungan dengan komunis. Adapun tinjauan dari faktor eksternal bila ditinjau dari intervensi Uni Soviet di Republik Tiongkok adalah.

a. Pendirian Partai Kungchintang (PKT) Tahun 1921

Partai Komunis Uni Soviet yang baru saja memenangkan revolusi berusaha mengembangkan pengaruhnya di Republik Tiongkok. Pada tahun 1920, Uni Soviet mendirikan Biro Timur Jauh di Siberia yaitu sebuah cabang dari Komintern. Pendirian biro ini bertanggung jawab mengatur pendirian Partai Kungchintang di Tiongkok dan negara Mongolia, Korea, dan Jepang. Komintern mengirimkan Grigori Voitinsky untuk melakukan penyusupan di pemerintahan Republik Tiongkok dengan cara memberikan tawaran bantuan. Voitinsky bertugas mencari kader-kader komunis yang revolusioner di Tiongkok. Pada bulan Mei 1920, Voitinsky bertemu Chen Duxiu seorang pemuda yang berperan dalam gerakan 14 Mei. Voitinsky memberikan pengarahan kepada Chen Duxiu untuk mempersatukan organisasi politik di atas kelompok sosialis. Akhirnya pada bulan Agustus 1920, Voitinsky menghubungi kaum komunis Tiongkok yang dihadiri oleh Chen Duxiu, Shi Cuntong, Li Hanjun, Shen Xuanlu, Yu Xiusong, untuk memulai pendirian Partai Kungchintang (The Epoch Times, 2005: 20).

Pada Juni 1921, Zhang Tailei mendapat tugas untuk menyerahkan proposal pendirian Partai Kungchintang sebagai cabang dari Komintern kepada Biro Timur Jauh di Kota Irkutsk, Siberia (Sutopo, 2009: 95). Pihak Komintern berusaha mendirikan sebuah partai kaum buruh dan petani yang revolusioner untuk dijadikan implementasi keberhasilan revolusi gaya Bolshevik ke Republik Tiongkok. Partai Kungchintang didirikan tanggal 23 Juli 1921, pendirian tersebut juga dibantu agen

komintern bernama Maring dan Nikolsky untuk membentuk partai-partai revolusioner di Republik Tiongkok (Pattiradjawane, 1991: 1).

b. Reorganisasi Partai Nasional Rakyat Tiongkok Tahun 1919-1924

Pasca pembentukan Partai Kungchintang tahun 1921, pemerintah Uni Soviet mengirimkan Abraham Adolf Joffe untuk membicarakan tentang pengembalian daerah konsesi dalam pelabuhan-pelabuhan di Republik Tiongkok. Uni Soviet menawarkan pemberian bantuan dalam bidang birokrasi pemerintahan kepada pemerintah Republik Tiongkok untuk normalisasi hubungan diplomatik. Sun Yat Sen menerima tawaran bantuan tersebut dengan syarat pelarangan pengenalan susunan pemerintahan komunis Uni Soviet ke Republik Tiongkok (Lan, 1952: 287).

Runtuhnya pemerintahan warlord, membuat Sun Yat Sen melakukan perhubungan dengan Uni Soviet mengenai perbaikan keadaan politik dan organisasi. Sun Yat Sen mengirimkan sebuah delegasi bernama '*missi Dr. Sun Yat Sen ke Uni Soviet*', yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek untuk melakukan kunjungan pemerintah serta belajar sistem birokrasi di Uni Soviet. Uni Soviet mengirimkan kunjungan balasan ke Republik Tiongkok, dengan mengirim Michael Borodin untuk mengurus perbaikan birokrasi di Partai Kuomintang. Atas bantuan Uni Soviet, pada tahun 1924 didirikan 'Akademi Militer Whampoa' dengan kepala akademi Chiang Kai Shek (Lan, 1952: 288). Sun Yat Sen melakukan kebijakan reorganisasi Kuomintang, sebagai contoh dalam reorganisasi ini yaitu Uni Soviet, dikarenakan negara Barat (Amerika Serikat dan Inggris) dalam konferensi Washington menolak reorganisasi dan lebih senang melangsungkan hubungan dagang dengan tuan tanah di Peking (Clyde dalam Agung, 2012: 2).

1.2 Faktor Internal

Pemasalahan pokok utama yang melatarbelakangi konflik internal di dalam pemerintahan yaitu kaum komunis dibatasi dalam kebijakan di pemerintah. Pasca

meninggalnya Sun Yat Sen tahun 1925, pengaruh golongan intelektual yang awalnya bersifat independen, mulai bergabung dengan kaum nasionalis di pemerintahan. Pasca kaum nasionalis dan kaum komunis bersatu di dalam pemerintahan dan dengan kelanjutan suksesnya kampanye Chiang Kai Shek di wilayah Tiongkok Utara. Kemenangan tentara Chiang Kai Shek di wilayah Tiongkok Selatan berhasil mencapai gerbang Shanghai pada 21 maret 1927.

Pemerintahan nasionalis membagi kekuasaan menjadi dua yaitu kaum nasionalis sebagai pemimpin dan para kapitalis di Shanghai sebagai golongan kedua di pemerintahan. Kaum nasionalis merubah kebijakan dengan mendiskriminasikan kaum komunis dan mulai mendekati kaum borjuis. Saat bersamaan pula para penasihat Uni Soviet diberhentikan bahkan ada pula yang dieksekusi. Keputusan tersebut datang dari Chiang Kai Shek yang menentang keputusannya yaitu membagi kubu kiri tahun 1927 yang dibentuk sebagai musuh wilayah Hankow.

Chiang Kai Shek membuat pemerintahan nasionalis di Nanking menduduki pemerintahan secara mutlak pada bulan April 1927. Kaum komunis kecewa karena menjadi program pemerintahan lebih mementingkan kebutuhan industri di Tiongkok. Kaum komunis keluar dari pemerintahan dan mengorganisir kekuatan golongan bawah seperti petani dan buruh. Hal ini yang menjadi faktor intern konflik.

2. Latar Belakang Konflik Tahap Kedua Tahun 1945-1949

Periode tahun 1945-1949, di Republik Tiongkok merupakan puncak dari propaganda pembagian tanah. Tujuan dari reformasi tanah adalah untuk menghilangkan kelas tuan tanah feodal. Kebijakan yang diambil kaum nasionalis berusaha mendekati Amerika Serikat untuk meminta bantuan dan mendekati golongan pengusaha di kota-kota besar. Adapun faktor-faktornya dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1 Faktor Eksternal

Kondisi Tiongkok pasca perang dunia II menimbulkan perebutan pengaruh dari kepentingan asing antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat membantu kepentingan kaum nasionalis berusaha menjadikan bentuk negara agar tidak jatuh ke komunis dan Uni Soviet membantu kaum komunis untuk melakukan perebutan kekuasaan. Adapun faktor-faktor dari luar antara lain.

a. Bantuan Amerika Serikat di Pemerintahan Chiang Kai Shek Tahun 1945-1949

Pada tanggal 6 Agustus 1945 angkatan udara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Bersamaan dengan berakhirnya perjanjian tidak saling menyerang antara Uni Soviet dan Jepang, sebagaimana telah disepakati oleh konferensi Yalta, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 Uni Soviet menyatakan perang dengan Jepang. Pada hari berikutnya Marsekal dari Uni Soviet Rodion Malinovski menggerakkan pasukannya menyerang Manchuria. Pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua jatuh di Nagasaki, sehingga tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat.

Pasca Perang Dunia II (PD II) berakhir dan Jepang menyerah, kaum nasionalis dan kaum komunis saling berlomba menduduki posisi yang paling baik di bagian Tiongkok yang sebelumnya diduduki oleh Jepang. Kaum nasionalis lebih memilih menguasai kota-kota besar terlebih dahulu. Chiang Kai Shek kemudian merasa khawatir dengan Tentara Merah yang menguasai daerah pedesaan yang sangat luas sehingga dengan cepat dapat menguasai daerah-daerah bekas pendudukan Jepang beserta persenjataannya. Chiang Kai Shek meminta bantuan Amerika Serikat dan mengirimkan pasukannya sebanyak lima puluh ribu marinir yang akan ditempatkan di daerah-daerah yang penting. Tentara dari tiga negara Amerika, Inggris dan Tiongkok diterbangkan ke Beijing, Tianjin, Shanghai, dan Nanjing dengan total keseluruhannya setengah juta tentara. Uni Soviet telah lebih dahulu menguasai Manchuria dan seratus ribu Tentara Merah berada di Tiongkok. Amerika Serikat yang

tidak menginginkan terjadinya perang dengan Uni Soviet, menyatakan bahwa kepentingannya berada di sana hanya untuk membantu melucuti persenjataan Jepang dan pemulangan mereka ke Jepang.

Pada Oktober 1945, kaum nasionalis dan komunis menyetujui untuk menjaga perdamaian, persatuan, pengintegrasian tentara, membentuk Majelis Permusyawaratan Politik Nasional dari semua partai, dan mempersiapkan pendirian pemerintah yang berdemokrasi. Presiden Truman mengutus Jenderal George Marshall, mantan Kepala Staff Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Pada mulanya reaksi kedua belah pihak cukup positif, permusuhan dihentikan dan di buat "Konferensi Nasional untuk Perundingan Politik" dengan wakil dari masing-masing partai dan golongan menyusun sebuah Undang-Undang Dasar Demokratis.

Pada tanggal 11 Maret 1946 Marshall kembali ke Amerika atas perintah Presiden Truman. Pasca Marshall meninggalkan Tiongkok, tidak lama kemudian terjadi bentrokan di Manchuria. Tentara Merah berhasil mengalahkan tentara nasional, kemudian Chiang Kai Shek segera membalas dengan mengirim pasukannya. Kaum Nasionalis telah menguasai daerah-daerah strategis di Manchuria. Saat Marshall kembali ke Tiongkok berhasil mengadakan gencatan senjata antara kaum nasionalis dan komunis.

b. Bantuan Uni Soviet di Kaum Komunis Tahun 1945-1949

Perang Dunia II berakhir dengan semakin menguatnya imperialisme AS dan Uni Soviet. Konflik yang tak terelakkan di antara mereka sudah terlihat jelas sebelum akhir Perang tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pasukan-pasukan Soviet meluncurkan Operasi Ofensif Strategis Manchuria (*Manchurian Strategic Offensive Operation*) untuk menyerang Jepang di Manchuria dan di sepanjang perbatasan Tiongkok-Mongolia. Dalam sebuah serangan kilat, tentara Soviet menghancurkan tentara Jepang dan menduduki Manchuria, 700 ribu pasukan Jepang yang ditempatkan di wilayah itu menyerah. Tentara Merah menaklukkan

Manchukuo, Mengjiang (pedalaman Mongolia), bagian utara Korea, bagian selatan Sakhalin, dan Kepulauan Kuril. Hal tersebut merupakan bantuan Uni Soviet ditujukan kepada kaum komunis.

Pasca menyerahnya Jepang, Chiang Kai Shek membuat perjanjian dengan Moskow yaitu tidak menyerang tentara merah di perbatasan Manchuria-Uni Soviet. Pihak Uni Soviet meminta kepada Chiang Kai Shek untuk tidak menyerang kaum komunis dan menyerahkan Manchuria ke tangan tentara merah. Kaum nasionalis tidak menyetujui, Uni Soviet menyetujui perjanjian dengan Chiang Kai Shek yaitu (Woods, 2010: 43); (1) wilayah kota-kota penting di Tiongkok Utara menjadi milik tentara nasionalis, dan (2) wilayah pedesaan menjadi milik tentara merah. Tujuan dari Uni Soviet yaitu mengaplikasikan seluruh kekuatan basis di pedesaan untuk merekrut sebesar-besarnya kader-kader yang militan.

2.2 Faktor Internal

Faktor utama yaitu di bidang pemerintahan. Penerapan sistem satu partai dalam pemerintahan dengan menghapus sistem multipartai menimbulkan kecemasan dari Mao Tse Tung. Mao Tse Tung menuntut agar kaum nasionalis setuju untuk mendirikan sebuah pemerintahan koalisi guna menggantikan pemerintahan satu partai (Kuomintang). Pada 14 Agustus 1945, Uni Soviet bergerak selangkah lebih jauh. Uni Soviet merundingkan dengan pemerintahan Chiang Kai Shek sebuah Perjanjian Persahabatan dan Aliansi Tiongkok-Soviet (*Sino-Soviet Treaty of Friendship and Alliance*). Selanjutnya Stalin menasihati kaum Komunis Tiongkok bahwa pemberontakan mereka "tidak memiliki prospek" dan bahwa mereka harus bergabung dengan pemerintahan Chiang Kai Shek serta membubarkan tentara merah. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain.

a. Faktor Kekalahan Tentara Nasionalis Chiang Kai Shek Tahun 1945-1949

Pada tahun 1948, tentara merah di bawah pimpinan Lin Biao setahap demi setahap berhasil menduduki semua kota di Manchuria. Tentara-tentara nasionalis mulai

mengalami kekalahan secara terus menerus. Kaum Nasionalis telah kehilangan tentara-tentaranya, persenjataan mereka termasuk bantuan militer dari Amerika. Kaum nasionalis pada bulan Januari 1949 telah kehilangan lima grup tentara, korps mobil baja. Berikut adalah beberapa penyebab kekalahan Tentara Nasionalis terhadap kaum komunis, yaitu.

1. Tentara Nasionalis mengalami kesalahan kepemimpinan, salah satunya yaitu Chiang Kai Shek mengirim terlalu banyak tentara ke Manchuria ketika sebelah selatan tembok besar membutuhkan penjagaan. Sehingga dalam waktu singkat nasionalis telah kehilangan tentaranya.
2. Terjadinya inflasi yang sangat tinggi dan hancurnya perekonomian terutama setelah perang dengan Jepang. inflasi dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan telah menghancurkan kehidupan rakyat Cina.
3. Pemerintah telah kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat terutama setelah perang dengan Jepang, ketika masyarakat masih menderita akibat pendudukan Jepang, para pemimpin Partai Kuomintang sibuk untuk mengambil alih tempat dan barang-barang yang ditinggalkan oleh Jepang.
4. Kegagalan perantara dan bantuan dari Amerika Serikat.
5. Lambatnya reformasi sosial dan ekonomi.

b. Faktor Kemenangan Tentara Merah Tahun 1945-1949

Perjuangan perebutan kekuasaan yang dilakukan kaum komunis berlanjut setelah kekalahan Jepang atas Sekutu. Sehubungan dengan perebutan kekuasaan, kaum komunis mengandalkan tiga metode yaitu; penguatan partai, perjuangan bersenjata, dan front persatuan (Hsueh, 1961: 229). Erat terkait dengan perjuangan bersenjata adalah reformasi tanah. Kaum komunis mendapatkan pasokan dana sebesar 20.000 Yuan per bulan (Sutopo, 2009: 95).

Selama perang Tiongkok-Jepang tahap II, Partai Kungchantang mengubah kebijakan pra perang yaitu melakukan penyitaan tanah kepada para tuan tanah dan mendistribusikannya di antara para petani. Kebijakan baru tersebut untuk mengurangi sewa dan bunga. Pasca

Jepang menyerah kepada sekutu tahun 1945, Komite Sentral Partai Kungchantang melakukan perubahan di bidang pertanahan. Kebijakan pertanahan dimaksudkan untuk menguatkan posisi Partai Kungchantang dimata rakyat Tiongkok yang didominasi kaum petani dan buruh. Akhirnya, pada tanggal 10 Oktober 1947, menyediakan untuk pemerataan tanah per kepala.

Strategi yang diterapkan kaum komunis menimbulkan simpati dari rakyat. Strategi tersebut menyangkut penguatan persenjataan tentara merah dibantu oleh Uni Soviet. Kemenangan tentara merah dikarenakan jiwa atau kekuatan motivasi sangat tinggi, hal itu berbanding terbalik dengan tentara nasionalis yang lemah.

C. Dampak Konflik Antara Kaum Nasionalis dan Komunis Di Republik Tiongkok Tahun 1949

Konflik antara kaum nasionalis dan komunis terjadi karena perbedaan paham. Perbedaan paham mengakibatkan kondisi pemerintahan tidak stabil. Persaingan dari tentara nasionalis yang dibantu Amerika Serikat, sedangkan tentara pembebasan rakyat dibantu Uni Soviet, hal itu saling memberikan bantuan kepada kedua pemerintahan di Republik Tiongkok. Dampak yang paling besar antara kedua negara pemenang Perang Dunia II yaitu perebutan hegemoni di Tiongkok. Bila ditinjau jumlah masyarakat mencapai separuh dari penduduk dunia. Di bawah ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari konflik antara kaum nasionalis dan komunis antara lain.

1. Kemenangan Kaum Komunis & Terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok Tanggal 1 Oktober 1949

Pada tahun 1949 merupakan awal perubahan kekuatan di Republik Tiongkok. Kaum komunis yang didukung para petani dan buruh dengan mudah mengorganisir kekuatan tentaranya. Di sisi lain pihak komunis didukung Uni Soviet yang rutin mengirimkan bantuan persenjataan. Kemenangan kaum komunis juga didukung peranan kaum intelektual yang semula mendukung Chiang Kai Shek menjadi mendukung

perjuangan kaum komunis. tenaga pendorong yang paling kuat adalah pemberontakan kaum tani terhadap kediktatoran pemerintahan Chiang Kai Shek.

Melihat situasi yang demikian, maka pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengurangi tentaranya dan memutuskan bantuan kepada Chiang Kai Shek. Di pihak komunis dengan semakin menajaknya kemenangan, maka pihak komunis mendukung-dukung slogan dengan kepergian Chiang Kai Shek. Slogan yang dikeluarkan pihak komunis tersebut yang menyebabkan Chiang Kai Shek mengundurkan diri sebagai Presiden Tiongkok pada 21 Januari 1949 (Agung, 2012: 33). Pemerintahan diserahkan kepada wakil presiden yakni Jenderal Li Chung Yen. Perubahan kepala pemerintahan nasionalis ini diikuti oleh jatuhnya kota Peiping tanggal 31 Januari 1949. Dengan jatuhnya Peking, pihak nasionalis semakin terdesak karena Nanking terancam, maka ibukota nasionalis dipindahkan ke Canton.

Akibat konflik antara kaum nasionalis dan komunis menghasilkan exodus tentara nasionalis di Taiwan. Pemerintah nasionalis yang kalah perang mengasingkan diri ke Taiwan dengan tentara nasionalis menyeberang Selat Taiwan sepanjang 100 km. Alasan memilih Taiwan yaitu Pulau Taiwan merupakan bagian dari Propinsi Fukien. Saat pemerintahan dinasti Sung membangun pos terdepan di Taiwan mengenai lahan pertanian (Eberhard, 1969: 323).

3. Terbentuknya Republik Taiwan Tahun 1949

Latar belakang internal kekalahan kaum nasionalis adalah tidak mampu mengatur administratif pemerintahan Republik Tiongkok. Hal itu dikarenakan pemerintahan kaum nasionalis (Republik Tiongkok) kurang mendapat kepercayaan dari rakyat karena banyak terjadi korupsi di pemerintahan. Pada akhir tahun 1948, posisi kaum nasionalis (Kuomintang) tidak stabil di pemerintahan dan menyebabkan timbulnya kekacauan ekonomi dan politik.

Pasca tanggal 1 Oktober 1949 Chiang Kai Shek bersama pasukan 1,5 Juta Tentara Nasionalis dan dua juta pengungsi, terutama dari kaum pemerintah dan komunitas bisnis, melarikan diri menuju Pulau Taiwan (BBC News,

2005: Tanpa Halaman). Pada tanggal 7 Desember 1949 Chiang Kai Shek menyatakan Kota Taipei sebagai ibukota sementara Republik Tiongkok di Pulau Taiwan. Pulau Taiwan akan dijadikan daerah *Exile Government* (pemerintahan pelarian) oleh Chiang Kai Shek. Maksud pemerintahan pelarian dalam kasus ini, untuk mempertahankan status pemerintahan di Tiongkok yang direbut Kaum Komunis (Kungchantang). Aspek Internasional pemilihan Pulau Taiwan adalah untuk mendekati Amerika Serikat, alasan utama yaitu agar bantuan yang dikirimkan tidak terhambat oleh Kaum Komunis.

Pemerintahan Chiang Kai Shek masih berharap bahwa suatu saat masyarakat Taiwan akan kembali ke Tiongkok daratan. Pasca kekalahan yang dialami kaum nasionalis mengakibatkan bantuan Amerika Serikat yang diberikan kepada Chiang Kai Shek dihentikan. Chiang Kai Shek bersikeras mempertahankan pemerintahan kaum nasionalis yang dianggap sah di Tiongkok yang mencakup daratan Tiongkok dan Pulau Taiwan. Pemerintahan Tiongkok di Taiwan.

2. Terbentuknya Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang Tahun 1959

Pasca berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949, kondisi di Asia Timur membawa pengaruh di Asia Tenggara. Kondisi demikian akibat kemenangan yang dialami kaum komunis pimpinan Mao Tse Tung. Secara langsung membawa pengaruh ke negara tetangga Republik Rakyat Tiongkok seperti Vietnam, Korea, Cambodia, Laos. Perhatian utama Republik Rakyat Tiongkok adalah kawasan Asia Tenggara khususnya wilayah Indonesia dan Vietnam. Alasan tertariknya Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia adalah memiliki partai komunis terbesar di dunia. Partai Komunis Indonesia dijadikan basis kekuatan komunis Asia Tenggara. Di negara Vietnam dijadikan sebagai pengawas kegiatan Amerika Serikat yang mendirikan SEATO di Thailand. Kebijakan politik luar negeri RRT pasca kemenangan tahun 1949 melawan Chiang Kai Shek

dengan melaksanakan teori domino komunis di Asia khususnya Asia Tenggara.

Pasca kemenangan hegemoni Uni Soviet di Tiongkok tahun 1949 mengakibatkan perebutan paham diutamakan di wilayah Asia. Penduduk Asia merupakan yang terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha mengadakan intervensi di negara-negara Asia. Keadaan tersebut semakin menambah rumit karena masuknya RRT dilandasi kebijakan luar negeri tentang penyebaran komunisme gaya Mao Tse Tung. Militansi Tentara Merah RRT telah mengalahkan negeri asal komunisme (Uni Soviet). Ajaran komunisme Tiongkok semakin banyak pengikut khususnya di Asia Tenggara (Indo China). Terdapat kepentingan negara Amerika Serikat berada di Filipina dan Thailand, sementara kepentingan Uni Soviet di Indonesia. Realitas yang terjadi melihat ajaran yang cepat diterima yaitu dari RRT. Hal itu bisa ditinjau pada bulan Desember 1949, RRT mengangkat Zhou Enlai sebagai Perdana Menteri. Kondisi demikian membuat terbentuknya poros Jakarta-Phnom Penh-Peking-Hanoi-Pyongyang. Latar belakang pendirian yaitu ingin menyeimbangkan kekuatan Uni Soviet dan Amerika Serikat dengan membentuk sekutu poros komunis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Proses konflik yang terjadi di Tiongkok dikarenakan dua faktor, yakni: faktor internal, karena dikeluarkannya kaum komunis dari Partai Kuomintang pada tahun 1927 yang mengakhiri kolaborasi antara kaum nasionalis dan kaum komunis selama empat tahun, hal ini disebabkan kebijakan pembatasan kekuasaan di dalam pemerintahan nasionalis, dan (2) faktor eksternal, karena terdapat intervensi komintern yang berusaha menyusupkan pengaruh komunisme di Republik Tiongkok dengan jalan melalui pengendalian Partai Kungchintang, bertujuan untuk membuat kaum komunis berkuasa di Tiongkok. Selain itu, konflik di Republik Tiongkok merupakan persaingan antara kaum nasionalis yang

berusaha memegang teguh 3 prinsip rakyat (*San Min Chu I*) dan kaum komunis berusaha menerapkan *Marxisme-Leninisme* dan doktrin komunis. Konflik antara kaum nasionalis dan kaum komunis dibagi menjadi dua tahap yaitu; (1) tahap revolusi birokrasi antara tahun 1927-1938, dan (2) tahap konfrontasi antara tahun 1945-1949.

Dampak yang ditimbulkan dari konflik antara kaum nasionalis dan kaum komunis, yaitu: (1) kemenangan kaum komunis di Tiongkok dan mendeklarasikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949, dan (2) kekalahan kaum nasionalis dibawah Chiang Kai Shek, pasukan nasionalis melarikan diri menuju Pulau Formosa (Taiwan) yang menyeberang Selat Formosa sejauh 100 km, kaum nasionalis mendirikan negara bernama Republik Taiwan. Dampak yang ditimbulkan selain itu ialah pasca kemenangan komunis di Tiongkok, perkembangan komunisme di Asia menyebar luas di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara bahkan penerapan teori domino komunis di Tiongkok menyebabkan perang hegemoni ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di dunia, Tiongkok merupakan kunci dari Uni Soviet yang sebagian besar penduduk dunia terdapat di Tiongkok.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan adalah.

1. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi warga negara terkait dengan masalah penyelesaian konflik politik mengenai penerapan bentuk negara dan dapat dijadikan guru kehidupan di masa yang akan datang;
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar mengenai Sejarah Asia Timur khususnya mengenai konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Tiongkok;
3. Bagi akademisi, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan pembaca diharapkan dapat menambah dan mengembangkan penelitian

mengenai Sejarah Asia Timur khususnya pergerakan nasional Tiongkok dan sampai terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Deni Adi Wijaya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Sumardi, M.Hum dan Bapak Drs. Sumarjono, M.Si yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya jurnal ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, L. 2012. *Sejarah Asia Timur 2*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- [2] Bain, A.C. 1962. *The Far East: An Outline History*. New Jersey: Littlefield Adams & Co.
- [3] BBC News. "Taiwan Assembly Passes Changes," BBC News, 7 Juni 2005. Tersedia: http://news.bbc.co.uk/1/hi/english/static/in_depth/asia_pacific/2000/taiwan_elections2000/1949_1955.stm [11 Oktober 2014].
- [4] Clegg, A. 1947. *De Geboorte Van Een Nieuw China Een Oversight Van Honderd Jaar Strijd*. Amsterdam: Uitgeverij Pegasus.
- [5] Eberhard, W. 1969. *A History of China*. Berkeley: University of California Press.
- [6] Ebrey, P., Walthall, A., Palais, J. 2009. *East Asia: A Cultural, Social, and Political History*. Belmont: Nelson Education Ltd.
- [7] Gottschalk, L. *Understanding History: a Primer of Historical Method*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1985. Jakarta: UI-Press.
- [8] Hsueh, C.T. 1961. *Selected Works Mao Tse Tung. Journal The China Quarterly, (Vol IV): 225-235*.
- [9] Lan, N.J. 1952. *Tiongkok Sepandjang Abad*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [10] Leung, P.E.W. 2006. *Essentials of Modern Chinese History: 1800 to the Present*. New Jersey: Research & Education Association.
- [11] Mittler, R. *Modern China: A Very Short Introduction*. Terjemahan oleh Freddy Mutiara. 2011. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Ping, Z.X. *China Sebuah Potret*. Terjemahan oleh Damaring Tyas Wulandari. 2009. Jakarta: Erlangga.
- [13] Sutopo, F.X. 2009. *China Sejarah Singkat*. Yogyakarta: Garasi.
- [14] *The Epoch Times*. 2005. *9 Komentar Mengenai Partai Komunis (buku yang menceraikan beraiakan Partai Komunis dan menggemparkan dunia)*. Jakarta: PT. Sinar Era Baru.
- [15] Tjeng, L.T. 1983. *Studi Wilayah Pada Umumnya Asia Timur Pada Khususnya Djilid II*. Bandung: Alumni.
- [16] Waung, W.S.K. 1971. *Revolution and Liberation: A Short History of Modern China From 1900-1970*. Hongkong: Heinemann Educational Books Ltd.
- [17] Wint, G. 1958. *Communist China's Crusade Mao's Road to Power and the New Campaign for World Revolution*. Washington: Frederick A.Praeger Inc Publishers.
- [18] Woods, A. *The Chinese Revolution of 1949*. Terjemahan oleh Pandhu Jakasurya. 2010. London: Tanpa Penerbit.